



**LAPORAN KINERJA
BPPMHKP MANADO
TRIWULAN II TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR



M U H L I N, S.Pi., M.Si
KEPALA BKIPM MANADO

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Manado triwulan I tahun 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Secara keseluruhan Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Manado triwulan I tahun 2024 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam mengimplementasikan sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang berisi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi Balai KIPM Manado.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Manado triwulan II tahun 2024 adalah mengacu pada Rencana Strategis Balai KIPM Manado Tahun 2021-2024 dan target kinerja Balai KIPM Manado 2023 berikut realisasinya. Pengelolaan manajemen kinerja di Balai KIPM Manado dilaksanakan dengan pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)*. Selama triwulan I tahun 2024 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil tercapai.



**Laporan Kinerja
BKIPM Manado
Triwulan II Tahun 2024**

Kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja triwulan II tahun 2024 kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala upayanya. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Manado, 12 Juli 2024



Muhlin
Muhlin, S.Pi, M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan perkarantina berkembang memasuki paradigma baru yaitu dari pendekatan menunjang kegiatan produksi dengan dimensi biologi, berkembang kepada pendekatan yang berdimensi ekonomi dengan substansi kesehatan dan keamanan pangan dalam konteks globalisasi perdagangan dunia.

Secara umum pada Triwulan I tahun 2024, Balai KIPM Manado telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif *balanced score card*. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Balai KIPM Manado pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pada sasaran strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif diperoleh indikator dari Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan dengan target 1 sertifikat telah terealisasi 1 sertifikat, Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability dengan target 5 UPI telah terealisasi 5 UPI, sertifikasi HACCP ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Manado dengan target 48 produk terealisasi 48 produk, UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan target 18 UPI telah terealisasi 18 UPI,
2. Pada sasaran strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina mutu dan kewanaman hasil perikanan secara professional dan partisipatif diperoleh indikator Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik dengan target 84 telah terealisasi 92.93, Indikator lokasi usaha perikanan yang



menerapkan Quality Assurance sesuai standar dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Manado tidak ada target di triwulan II ini

3. Pada Sasaran Strategis Tata Kelola Sistem Pemerintahan yang Baik dengan indikator Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat WBK lingkup Balai KIPM Manado pada triwulan II Tahun 2024 belum ada target dan realisasi, Indikator Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Manado belum tercapai 89.38 dari target 86 , Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup balai KIPM Manado triwulan ini belum ada target dan realisasi, Indikator Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Manado belum ada target dan realisasi triwulan ini, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan target 80 % terealisasi 100%, Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM terealisasi 94.50 dari target 93.76 Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado penilaiannya di lakukan di akhir tahun, Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado penilaiannya dilakukan di akhir tahun dan indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado penilaiannya dilakukan di akhir tahun.

Permasalahan yang dihadapi dan mempengaruhi pencapaian target kinerja, untuk selanjutnya akan menjadi perhatian utama dan akan dilakukan evaluasi guna merumuskan upaya-upaya ataupun strategi pemecahan masalah, sehingga di Triwulan II Tahun 2024 target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan maksimal.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
BAB I Pendahuluan		
Latar belakang	1
Tujuan	3
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Manado	..	4
Sistematika dan Penyajian	8
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja		
Rencana Strategis 2020-2024	9
Rencana Kinerja 2022	19
Anggaran Balai KIPM Manado	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja		
Capaian Kinerja	24
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	26
BAB IV Penutup	36
Lampiran	38



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja tahun 2024	20
Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Manado (RKAK/L)	22
Tabel 3. Capaian Kinerja Balai KIPM Manado TRIWULAN II 2024	25
Tabel 4. Realisasi Anggaran Triwulan I 2024 Per Jenis Kegiatan	35

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2021-2024 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju. Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai karantina Ikan, pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Manado dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktlitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan tangan dari Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado (BPPMHKP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai KIPM Manado yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Manado, maka disusun Pelaporan kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado.

TUJUAN

Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 ini di susun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Manado dan juga sebagai bahan informasi kepada pihak pihak terkait tentang kinerja Balai KIPM Manado yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja di masa mendatang.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALAI KIPM MANADO

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Manado menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;

- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 terdiri dari:

I. Kepala

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado merupakan unit pelaksana teknis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Manado adalah jabatan struktural Eselon III a yang membawahi 1 (satu) jabatan Struktural Eselon IV a dan 2 (dua) jabatan fungsional sub koordinator dan 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional,

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan

tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

2. Struktural bagian Umum dan Tata Usaha

Bagian Umum dan Tata Usaha pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan urusan umum dan tata usaha dan rumah tangga.

3. Sub Koordinator Bagian Tata Pelayanan

Sub koordinator bagian tata pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

4. Sub Koordinator Bagian Pengawasan, Pengendalian dan Informasi

Sub koordinator bagian pengawasan, pengendalian, dan informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.

Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam penyampaian

laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan isi Laporan Kinerja Triwulan II Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif:** bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang tujuan, sasaran dan capaian kinerja selama Tahun 2023.
2. **BAB I. Pendahuluan,** menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Balai KIPM Manado.
3. **BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,** menjelaskan muatan rencana Strategis Pembangunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado 2021-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado Tahun 2023.
4. **BAB III. Akuntabilitas Kinerja,** menjelaskan analisis pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023.
5. **BAB I. Penutup,** menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan kinerja dan menguraikan keberhasilan dan kekurangan kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan kegiatan anggaran Tahun 2023, disamping menyampaikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
6. **Lampiran-lampiran,** memuat data pendukung dalam bentuk tabel-tabel yang menjelaskan antara lain Bagan Organisasi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado, Rencana Strategis 2021-2024, serta Penetapan Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2021 – 2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yaitu 2021-2024 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado dalam mendukung pembangunan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, maka visi dan misi yang di emban Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado 2021-2024 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM Manado menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2021-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Strategis

Dalam Rencana Strategis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan 2021-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan yang mengacu pada pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado.

Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dicapai Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado dari program yang dilaksanakan yaitu:

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.
2. Tata Kelola Pemerintahan Yang baik

Arah Kebijakan BPPMHKP Manado

- A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado

Sasaran pembangunan jangka menengah 2021-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju

dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, salah satu agenda pembangunan yang diusung oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif di seluruh wilayah Sulawesi Utara;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (official control). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan;
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasle;
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan karantina;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasle;
6. kegiatan inspeksi dan surveillance sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan;
8. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran;
9. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana laboratorium pengujian;
10. meningkatkan kompetensi laboran dan penambahan ruang lingkup pengujian laboratorium;

11. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan;
12. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
13. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri;
14. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (compliance);
15. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan;
16. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian penyakit ikan dan mutu keamanan hasil perikanan;

Disamping dua agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan;
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado;
4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik;

5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan;
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan;
7. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
8. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan;
9. optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado;
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado, serta
5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan stakeholders kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders-BKIPM Manado. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi

dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

B. Arah Kebijakan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM Manado dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun 2021-2024 untuk mewujudkan 6 (lima) tujuan dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional. Selain itu Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado juga melakukan peningkatan kualitas layanan sertifikasi melalui layanan berbasis digital dan penyediaan full service 1 x 24 jam setiap hari kepada pengguna jasa. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado juga melakukan inovasi dengan berkolaborasi dengan instansi terkait ataupun pihak-pihak terkait untuk mewujudkan direct call ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Utara ke beberapa Negara tujuan ekspor, seperti yang telah dilakukan awal tahun 2023 yang mana Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan Manado dan BEA Cukai Manado telah berhasil mewujudkan direct call ekspor komoditi perikanan dari bandara samratulangi manado ke Jepang. Direct call ekspor merupakan salah satu instrumen sebagai upaya meningkatkan daya saing, volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Sulawesi Utara karena dengan direct call ini maka efisiensi waktu dan biaya dapat dilakukan.

3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah modernisasi sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Kantor pelayanan Bea Cukai Manado dan Bitung. Selain itu untuk memperlancar arus barang juga dilakukan upaya bersama instansi terkait dalam mewujudkan direct call ekspor komoditi perikanan dari Manado ke Negara-negara tujuan ekspor yang potensial.

6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboran dan menambah ruang lingkup pengujian laboratorium.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP- Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

RENCANA KINERJA 2024

Rencana kinerja Tahun 2024, yang disusun dengan pendekatan balance scorecard, merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado 2021-2024 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tingkat Balai KIPM Manado diimplementasikan dalam penetapan target kinerja Tahun 2023 dan peta strategi (*strategy map*) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado Tahun 2023. Selanjutnya secara berjenjang target kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tersebut diturunkan (*cascading process*) ke sub koordinator sampai dengan tingkat individu.

Target kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun 2024 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, serta peta strategi Balai KIPM Manado Tahun 2024 telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Target Kinerja Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	5
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	30
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Manado (produk)	90
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	40
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Manado (nilai)	85
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Lokasi)	2

Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK.3.1	Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	7	Nilai Minimal yang dipresyaratkan untuk mendapatkan predikat WBK lingkup Balai KIPM Manado (Unit)	75
		8	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM Lingkup balai KIPM Manado (Indeks)	84
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Manado	85
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Manado (Unit)	100
		11	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	75
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	93.75
		13	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(Nilai)	82
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	77,5
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	77,5

Anggaran BPPMHKP Manado

Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun 2024 di arahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun anggaran 2024 sebesar) Rp.6.115.563.000,-

Strategi Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereview kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran kegiatan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Manado (RKAK/L)

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Mutu	425.000.000,-
2	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	211.500.000,-
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.452.663.000,-
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2024		6.115.563.000

Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka Maksimum adalah 120;
2. Angka Minimum adalah 0;
3. Formula Penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda sebagaimana penelasa berikut :
 - a. Polarisasi Maximize Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

- b. Polarisasi Minimize
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

- c. Polarisasi Stabilize
Pada polarisasi stabilize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang tertuang di perjanjian Tahun 2024 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) ke dalam tiga sasaran strategis yaitu industrialisasi KP yang berdaya saing, Sumber daya kelautan yang berkelanjutan, tata Kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2021 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement) yang masih disesuaikan dengan renstra Balai KIPM Manado Tahun 2021-2024, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja Balai KIPM manado.

Capaian atas 15 (Lima Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas di sajikan pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
Triwulan II Tahun 2024**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET Triwulan I	REALISASI		
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu							
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	1	1	Sertifikat	100
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	5	5	UPI	100
		3	Sertifikasi HACCP ruang lingkup produk pada UPI Lingkup UPT Balai KIPM Manado (produk)	48	48	Produk	100
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	18	18	UPI	100
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan							
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Manado (nilai)	85	92.95	Nilai	109
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Lokasi)	0	0	Parameter	0
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM							
		7	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat WBK Lingkup Balai KIPM Manado (Unit)	0	0	Unit	0
		8	Indeks Profesional ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado (Indeks)	86	89.38	Indeks	103.93
SK4.1	Tata Kelola pemerintahan yang baik	9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BKIPM	0	0	Nilai	0
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup balai KIPM manado (%)	0	0	Nilai	0
		11	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	80	100	%	125
		12	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	0	0	Nilai	0
		13	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	93.76	94.50	Nilai	100.78

		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	0	0	%	0
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	0	0	%	0

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

I. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara professional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara professional dan partisipatif menjadi focus utama dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didukung dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPPMHKP.

IKU I. Jumlah Sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan .

Ketertelusuran informasi asal bahan baku dan tujuan penggunaan bahan baku (adanya informasi yang akurat mengenai asal bahan baku yang dipergunakan oleh para pelaku usaha atau UPI) dari supplier yang menerapkan CPIB

Data Pengukuran Indikator Kinerja berasal dari hasil verifikasi penerapan sistem ketertelusuran di supplier (traceability), dengan tahapan:

- Pelaksanaan verifikasi
- Penyampaian hasil laporan verifikasi
- Evaluasi hasil verifikasi dan tindakan perbaikan
- Penerbitan sertifikat traceability bagi supplier

Nilai Indikator Jumlah Sertifikasi CPIB Supplier yang diterbitkan pada Triwulan II Tahun 2024 tetapkan target adalah sebesar 1 sertifikat dan telah terealisasi sebesar 1 sertifikat sehingga capaiannya adalah 100 %.

IKU 2. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem Traceability.

Dalam era globalisasi, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk perikanan semakin meningkat. Tuntutan ini seiring dengan arah globalisasi perdagangan yang mengedepankan aspek mutu dan keamanan pangan. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia terhadap aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa negara maju telah mempersyaratkan sistem traceability bagi produk perikanan Indonesia. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi target peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia.

Traceability menjadi salah satu hambatan ekspor produk perikanan Indonesia khususnya ke Negara Uni Eropa. Dengan kondisi yang demikian maka mau tidak mau sistem traceability sudah harus mulai diterapkan pada Unit Pengolahan Ikan secara bertahap untuk memenuhi persyaratan negara pengimpor. Balai KIPM Manado ditargetkan dapat merealisasikan penerapan sistem traceability pada Triwulan I 2024 ditetapkan sebesar 5 UPI dan telah terealisasi sebesar 5 UPI sehingga capainnya menjadi 100%.

IKU 3. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Official Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Manado.

Ikan dan produk perikanan merupakan salah satu sumber pangan dunia. Ketersediaan produk perikanan yang aman konsumsi sudah menjadi tuntutan Negara-negara pengimpor, oleh karena itu diperlukan adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan salah satu sistem jaminan mutu yang diterapkan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan Negara pengimpor produk perikanan Indonesia bahwa produk perikanan yang kita hasilkan telah memenuhi persyaratan produk perikanan yang aman dikonsumsi.

Target Triwulan II untuk Indikator Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan adalah 48 Produk. Dan terealisasi 48 produk HACCP, Dengan demikian target untuk indikator ini dapat direalisasikan dengan pencapaian 100%,

IKU 4. UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha perikanan yang memiliki Instalasi Karantina Ikan yang menerapkan prinsip Biosecurity dan unit usaha di bidang penanganan dan atau pengolahan ikan yang telah bersertifikat HACCP dan mempunyai nomor registrasi dari Otoritas Kompeten. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip Biosecurity/ CKIB adalah unit usaha pembudidayaan ikan (UUPI) yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar

Indikator Kinerja ini dilaksanakan melalui kegiatan surveilen, inspeksi dan verifikasi, dan Pada triwulan II Tahun 2024 tercapai 18 UPI dari target Triwulan II sebesar 18 UPI atau dengan capaian 100%.

IKU 5. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Manado

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik

Indikator Nilai survei kepuasan masyarakat Di Balai KIPM Manado pada triwulan II Tahun 2024 telah teralisasi sebesar 92.95 % dari target 85% sehingga capaiannya menjadi 109%.

IKU 6. Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Manado

Pada Triwulan II Tahun 2024 Tidak ada Target untuk indikator ini Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Manado.

II. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah sekarang wajib mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam menjalankan roda pemerintahan.

IKU 7. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat WBK lingkup Balai KIPM Manado

Sejalan dengan Good governance, tujuan utama dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi adalah untuk pencegahan korupsi kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Balai KIPM merupakan salah satu UPT yang menerapkan daerah WBK sehingga diharapkan Balai KIPM manado mencapai nilai yang di targetkan sebagai upt berpredikat WBK. Pada Triwulan II Tahun 2024 tidak ada target pada indikator ini.

IKU 8. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Manado

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-

tugasnya, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018), Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pengembangan SDM BKIPM, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan BKIPM.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini, pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), Pendidikan S-2 (Strata-Dua), Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D - 4 (Diploma empat), Pendidikan D3 (Diploma- Tiga)/ SM (Sarjana Muda), Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat, Pendidikan di bawah SLTA
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/ Konferensi/Setara satu tahun terakhir

Pada triwulan II 2024 ini tercapai indeks 89.38 dari target 86 sehingga capaiannya menjadi 103.93

IKU 9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup balai KIPM Manado

Nilai penilaian mandiri SAKIP adalah salah satu indikator Kinerja Utama pada tahun 2024. Aspek-aspek yang digunakan untuk menghitung nilai ini adalah:

1. Aspek Kepatuhan dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 30%)
2. Aspek Kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 30%)
3. Aspek Ketercapaian, dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 40%)

Tahun 2024 Target yang ditetapkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado adalah 85. Penilaian pada indikator ini dilakukan pada akhir tahun.

IKU 10. Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup BPPMHKP Manado

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

Pada Tahun 2024 nilai indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan pengukurannya dilakukan di akhir tahun.

IKU 11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.

Pada triwulan II tahun 2024 indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja terealisasi 100% dari 80% yang ditargetkan sehingga capaiannya menjadi 125%.

IKU 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Lingkup Balai BPPMHKP Manado.

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BPPMHKP didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan S-258/PB/2020.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Pada triwulan II Tahun 2024 Indikator ini tercapai 94.50 dari target triwulan II 93.76 sehingga capaiannya menjadi 100.78

IKU 13. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPPMHKP Manado.

Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011.

$$\text{NK} = (\text{P} \times \text{Wp}) + (\text{K} \times \text{Wk}) + (\text{PK} \times \text{Wpk}) + (\text{E} \times \text{WE})$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

- P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WVP) =9,7%
- K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Implementasi (WK)=18,2%)
- PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)
- E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Nilai Indikator Kinerja Anggaran pada tahun 2024 mempunyai target 82(Baik), penilaiannya dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun.

IKU 14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/jasa BPPMHKP Lingkup BPPMHKP Manado.

Indikator ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang dan jasa lingkup UPT BPPMHKP Manado yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan Pengadaan barang dan jasa diukur berdasarkan jumlah nilai dari Rencana Umum pengadaan yang telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE

(30%), laporan penyelenggaraan Pengadaan barang dan jasa (20%) serta kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Nilai Indikator Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa BPPMHKP lingkup BPPMHKP pengukurannya dilakukan pada akhir Tahun .

IKU 15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado

Indikator Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup BPPMHKP Manado merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kepatuhan pengelolaan BMN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur yaitu:

1. Tingkat pemamfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2024 (baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 20%)
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi asset) Tahun 2017 – 2023 (bobot 20%)
4. Pemamfaatan BMN dan hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara pemakaian (bobot 25%)
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (Bobot 20%)

Untuk Tahun 2024 Target nilai indikator tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Manado penilaiannya dilakukan di akhir Tahun .

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi BPPMHKP Manado Tahun 2024 sebesar Rp. 6.115.563.000,- dan pada triwulan II Tahun 2024

sudah terealisasi Sebesar Rp 3.230.243.094,- atau mencapai 52.82%. disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan Triwulan II Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi DIPA (Rp)	Prosentase (%)
Belanja Pegawai (51)	2.641.651.000	1.910.283.478	72.31
Belanja barang (52)	1.004.291.368	1.319.959.616	38.00
Belanja Modal (53)	0	0	0
Total	6.115.563.000	1.618.206.356	52.82

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan II 2024, dari 15 Indikator Kinerja Utama BPPMHKP Manado yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, terdapat 6 indikator yang capaiannya sesuai dan melebihi dengan target yang telah ditetapkan, dan 9 indikator belum dilakukan pengukuran karena pengukurannya dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun. Secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja Balai KIPM Manado pada Triwulan I 2024 sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target ditetapkan, yang berarti capaian kinerja Balai KIPM Manado di Triwulan I 2024 boleh dikatakan baik.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado Triwulan II 2024 dalam mendukung pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado serta semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi system jaminan kesehatan ikan serta system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 15 indikator kinerja utama, BPPMHKP Manado tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik.

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di triwulan mendatang diantaranya:

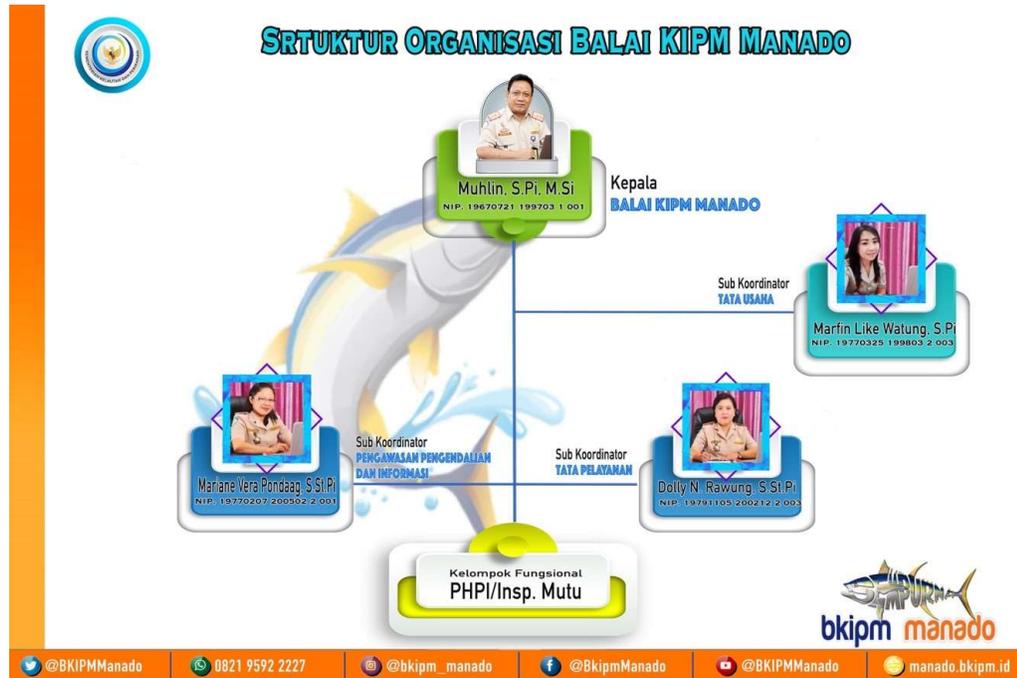
- I. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens antara Pusat dan UPT untuk mendapatkan angka yang realistis dan indikator kinerja yang lebih terukur.

2. Diperlukan adanya manual IKU yang secara jelas menggambarkan tata cara pengukuran masing-masing indikator kinerja untuk memudahkan UPT dalam hal pengukuran hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat, daerah serta instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.
4. Perlu adanya program/kegiatan yang konkrit untuk meningkatkan ekspor komoditi perikanan Sulawesi Utara, sebagai contoh Direct call ekspor komoditi perikanan.

Dengan melihat kecenderungan kondisi dimasa mendatang, dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tidak hanya membutuhkan anggaran tapi juga diperlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam kerangka Pembangunan jangka Menengah (RPJM) tahun 2021-2024.

Akhirnya Laporan Kinerja BPPMHKP Triwulan I 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, laporan ini juga diharapkan jadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) Strategic Plan) di lingkungan BPPMHKP Manado di masa mendatang.

Lampiran I.



Lampiran II. Perjanjian Kinerja



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM HYPERLINK "http://www.kkp.go.id" www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGEDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN MANADO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhlin**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : PIt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua
PIt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Manado



Muhlin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN MANADO**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Manado (sertifikat)	5
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Manado (UPI)	30
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Manado (Produk)	90
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Manado (UPI)	40
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Manado (nilai)	85
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Lokasi)	2
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	7	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat WBK lingkup Balai KIPM Manado (Unit)	75
		8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado (Indeks)	84
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Manado	85
		10	Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Manado (%)	100
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Manado (%)	75
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	93,75
		13	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	77,5
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	77,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengendalian Mutu	451.400.000,-
3.	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	211.500.000,-
4.	Dukungan Manajemen Internal	5.452.663.000,-
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2024		6.115.563.000,-

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt.Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado



Muhlin

Lampiran III Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024 Berdasarkan data Online
Monitoring SPAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II MANADO

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 06

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	032-567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	049	PAGU	2,641,651,000	3,473,912,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,115,563,000
				REALISASI	1,910,283,478	1,319,959,616	0	0	0	0	0	0	0	0	3,230,243,094
				PERSENTASE	(72.31%)	(38.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(52.82%)
				SISA	731,367,522	2,153,952,384	0	0	0	0	0	0	0	2,885,319,906	
				TOTAL	2,641,651,000	3,473,912,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,115,563,000
				REALISASI	1,910,283,478	1,319,959,616	0	0	0	0	0	0	0	0	3,230,243,094
				PERSENTASE	(72.31%)	(38.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(52.82%)
				SISA	731,367,522	2,153,952,384	0	0	0	0	0	0	0	0	2,885,319,906